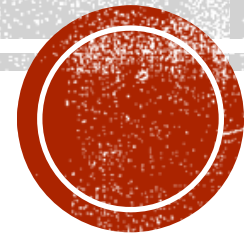


**PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN,
KETIMPANGAN & AGENDA REFORMA
EKONOMI YANG BERKEADILAN**
(EVALUASI KINERJA EKONOMI 10 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI)

Didin S. Damanhuri*)



*) Antara lain : Tenaga Ahli bid.Ekonomi Lemhannas RI (sejak 2007 –2022), Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan Univ.Paramadina, Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Ketua L-KEN (Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara), salah seorang Pendiri & Ekonom Senior INDEF (*Institute for Development Economic & Finance*), menerbitkan 67 buku sampai 2023, Pengamat Ekonomi, dll

“Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi lebih rendah dan kurang Berkualitas” (1):

Pertumbuhan rata-rata Era Presiden Jokowi (2015-2019) sekitar 5% lebih rendah dari periode sebelumnya: Dua periode Presiden SBY (2005-2014) sebesar 5,7% dan Era Pemerintahan Presiden Soeharto (1969-1997) sekitar 7 %.

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari 1) Rincian Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha (Sektor); 2) Rincian Komponen Sisi Pengeluaran ; 3) Dampak Pertumbuhan Ekonomi thd tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

- **Sektor2 yang menyerap Tenaga Kerja yang besar** : *Pertanian* hanya tumbuh 1,77% (2020), 1,87% (2021), 2,25% (2022), 1,3% (2023) dan 0,1% (Sem I 2024). Rata2 pertumbuhan sektor *Pertanian* 2015-2023 hanya mencapai 2.85%. Sementara pertumbuhan sektor *Industri Pengolahan* tahun 2019-2023 sebesar 4,89% (lbh rendah d.p pertumbuhan ekonomi). Secara rata-rata 2015-2023 hanya tumbuh 3,44%. Smntr, porsi thd PDB yg 2014 masih 21,08%, tahun 2023 tinggal 18,67%.

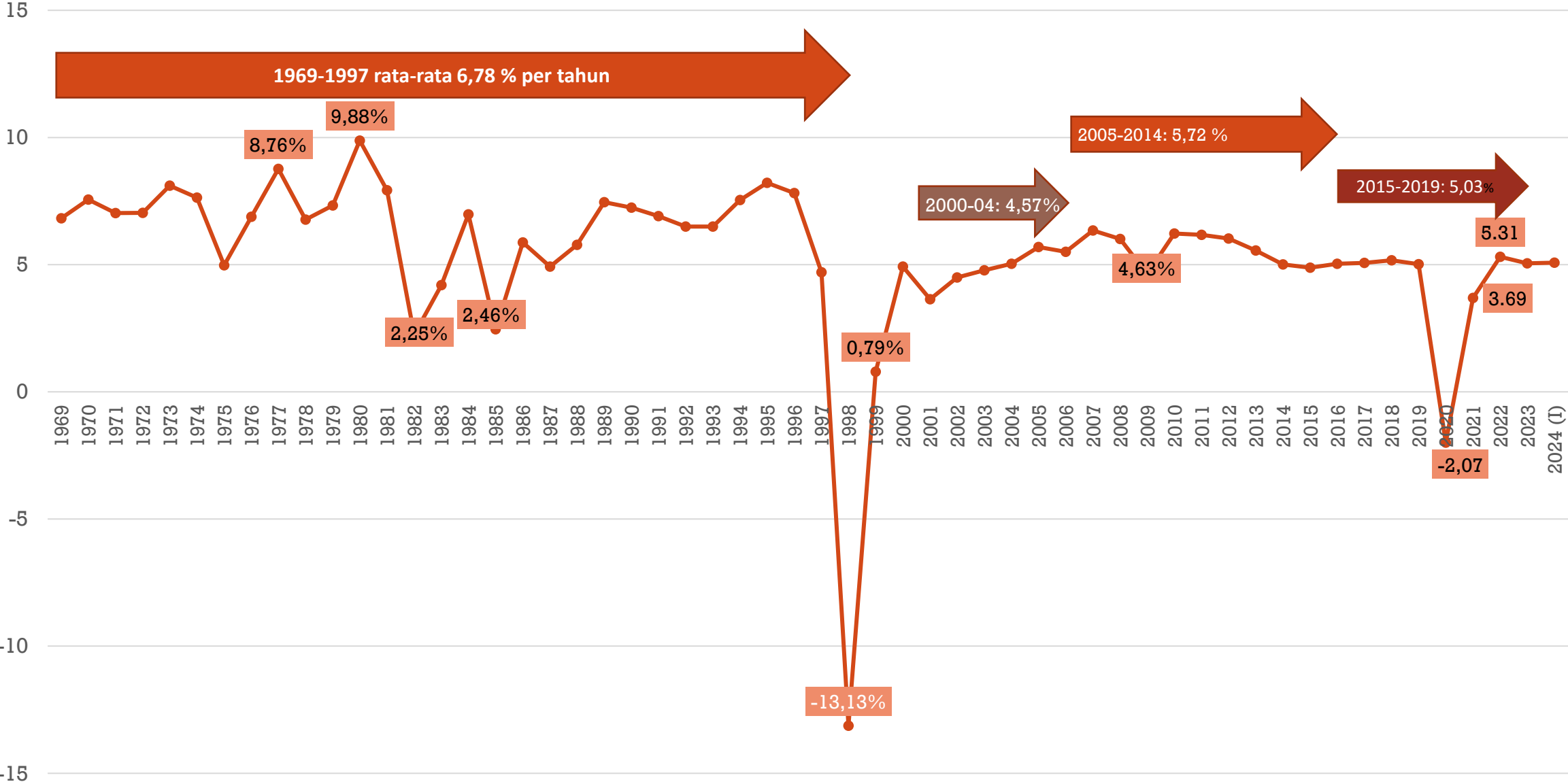


“Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi lebih rendah dan kurang Berkualitas” (2):

- **Dari sisi Pengeluaran** utk *Investasi* 2022 hanya tumbuh 3,87% (di bawah pertumbuhan ekonomi). Rata2 tahun 2015-2022 juga lebih rendah d.p pertumbuhan ekonomi (2018 tertinggi hanya mencapai 3,68). Pada era SBY, bisa mencapai 9%. Smntr, utk *Konsumsi Rumah Tangga* tumbuh 4,93% utk 2022, minus 2,63% utk 2020 dan 2,02% thn 2021. Dari sisi *Pengeluaran Pemerintah* malah minus 4,51% utk 2022. Smntr, Rata2 2015-2022 hanya 2,15%. Dari sisi **Expor tumbuh pesat**: 16,28% (2022), 17,95% (2021) 8,42% (2020), tapi 85% berasal dari Sawit, Batubara dan besi-baja yang kecil ekonomi rakyat dan sngt tergantung kpd harga2 internasional.
- **Dari sisi Pengurangan Kemiskinan** yg msh 9,57% atau 26,36 jt (2022) penurunannya sngt kecil dibandingkan sebelumnya. Selama 2014-2022 yang hanya berkurang 1,37 jt dari 27,73 jt atau 10,96% (2014).



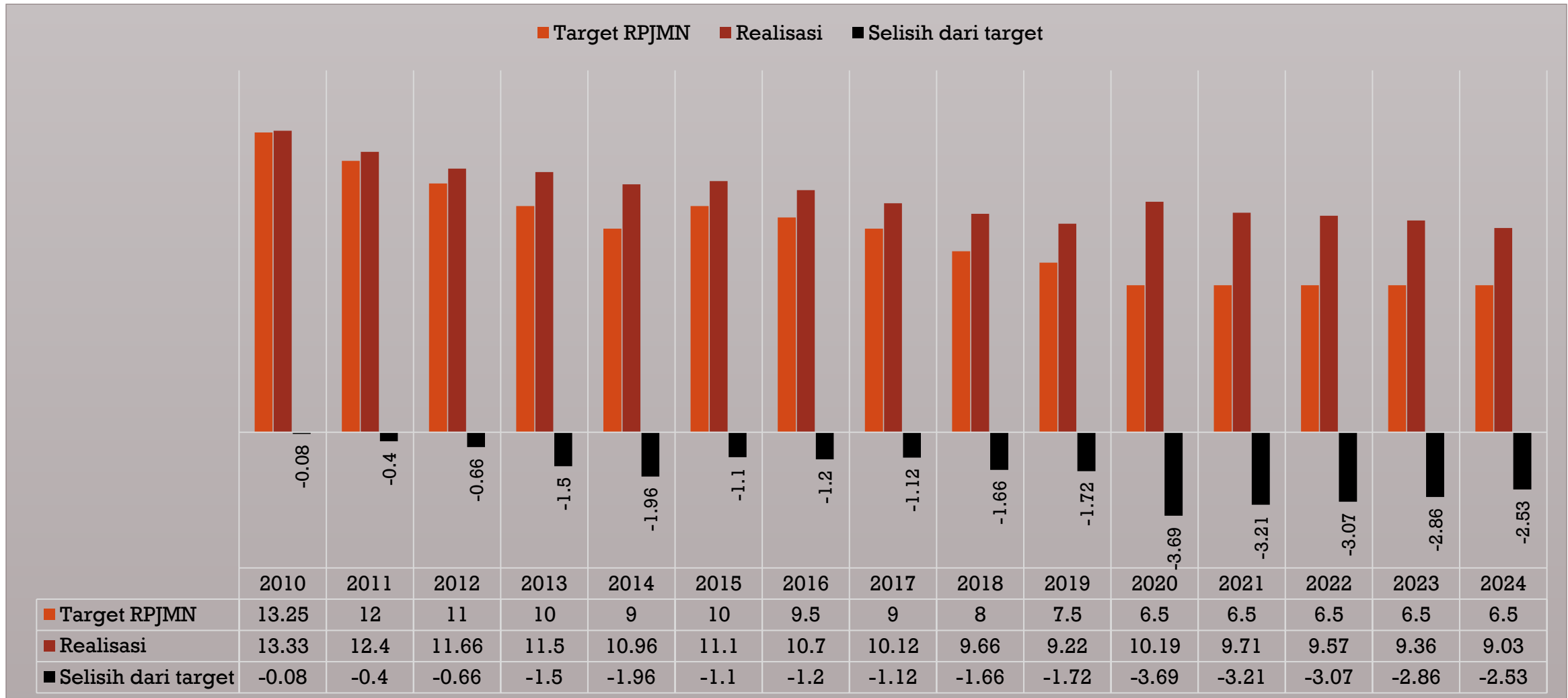
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 1969-2022



Sumber data: BPS, diolah



TARGET RPJMN DAN REALISASI TINGKAT KEMISKINAN



Target RPJMN berupa rentang diambil titik tengahnya; realisasi 2010-2020: kondisi September data BPS;
 Target 2020-2022: target 2024 RPJMN (tak ada rincian tahun); realisasi 2023: titik tengah sasaran APBN (diolah)



PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GDP Growth	5.56	5.01	4.88	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.69	5.30	5.05	5.08*
Kemiskinan	11.47	10.96	11.13	10.7	10.12	9.66	9.22	10.19	9.71	9.57	9.36	9.03
Gini Ratio	0.406	0.414	0.402	0.394	0.391	0.384	0.38	0.385	0.398	0.402	0.388	0.379
TPT	6.17	5.94	6.18	5.61	5.5	5.3	5.23	7.07	6.49	5.86	5.32	4.82

Sumber: BPS

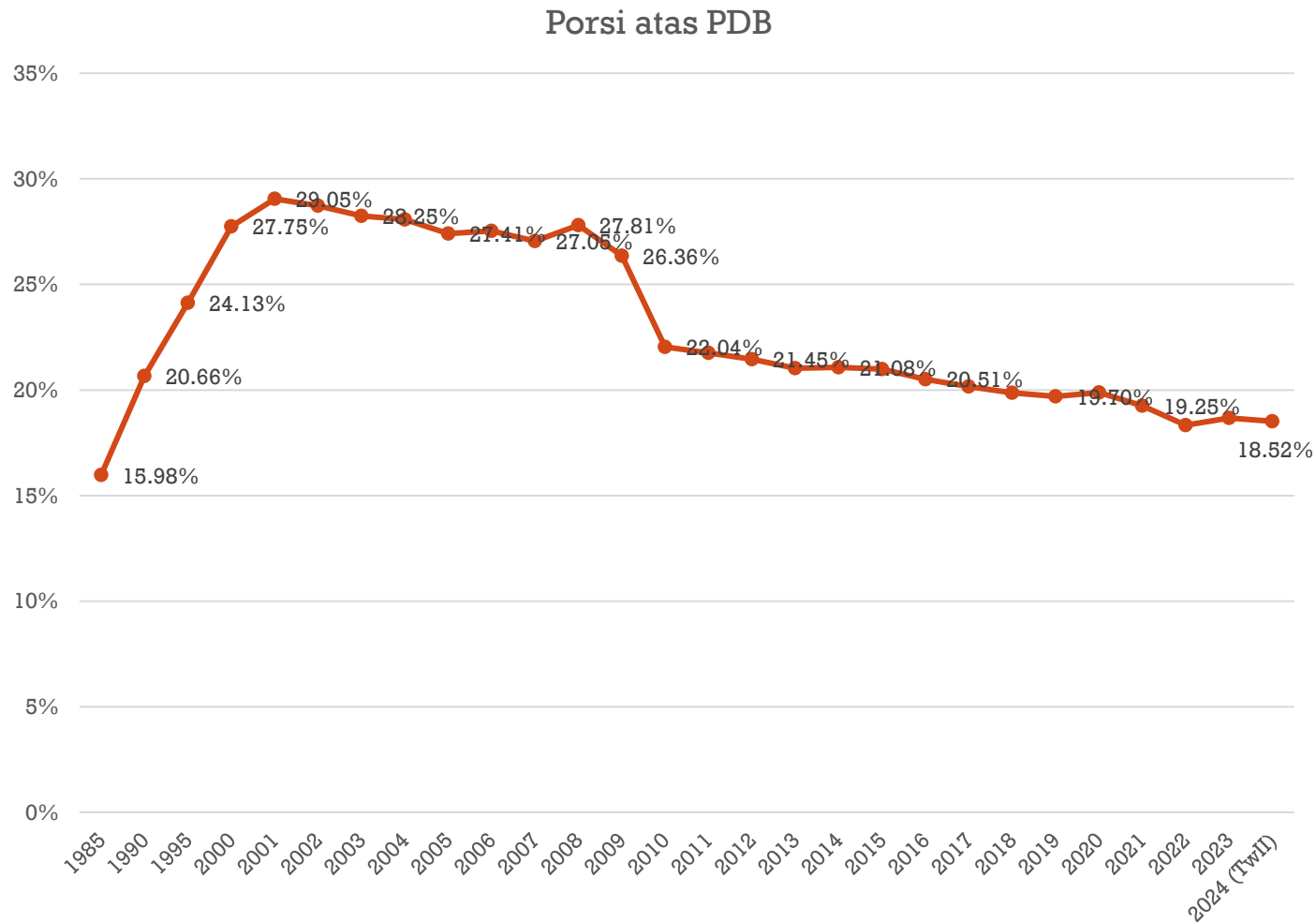
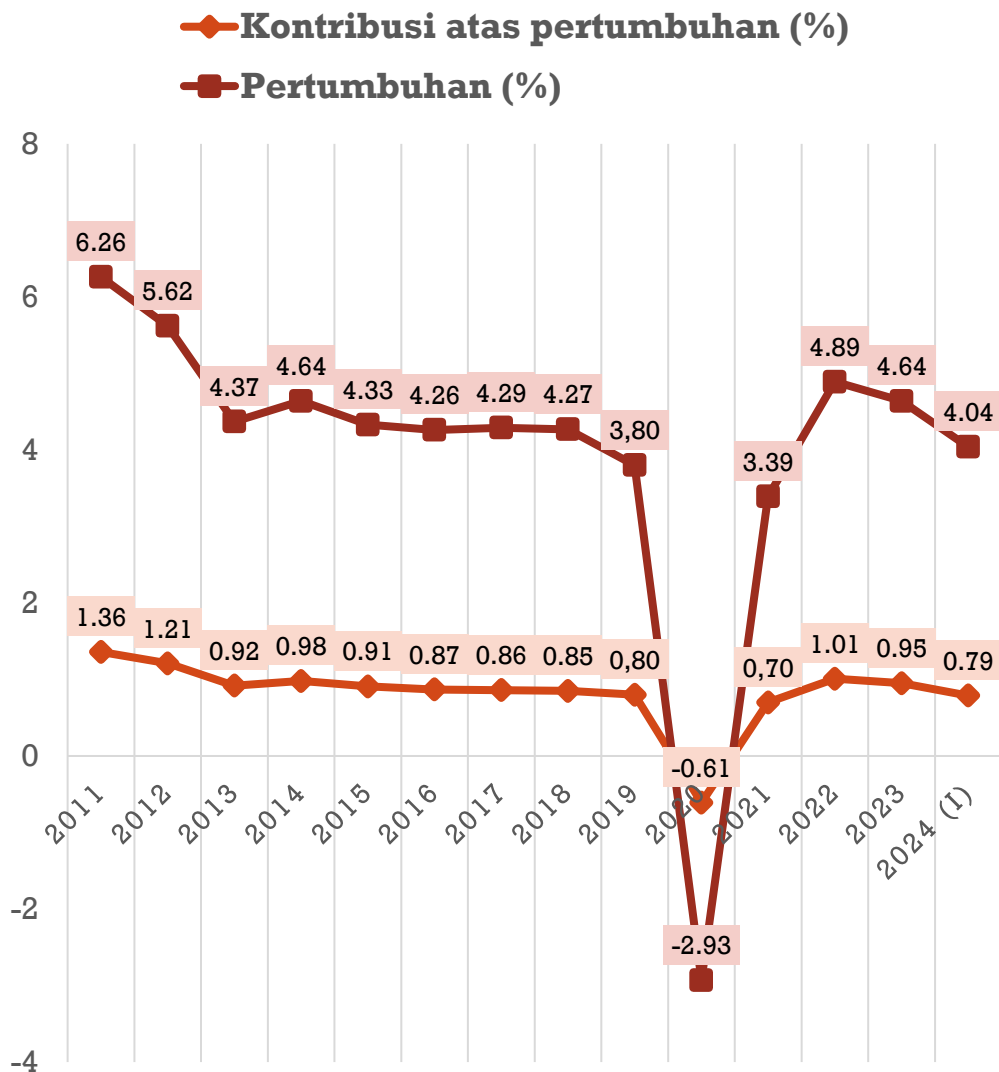
Data Kemiskinan pada September Pada Setiap Tahunnya (kecuali 2024 pada Maret)

TPT diambil pada Agustus setiap tahunnya (kecuali 2024 pada Februari)

*) Data hingga semester I 2024



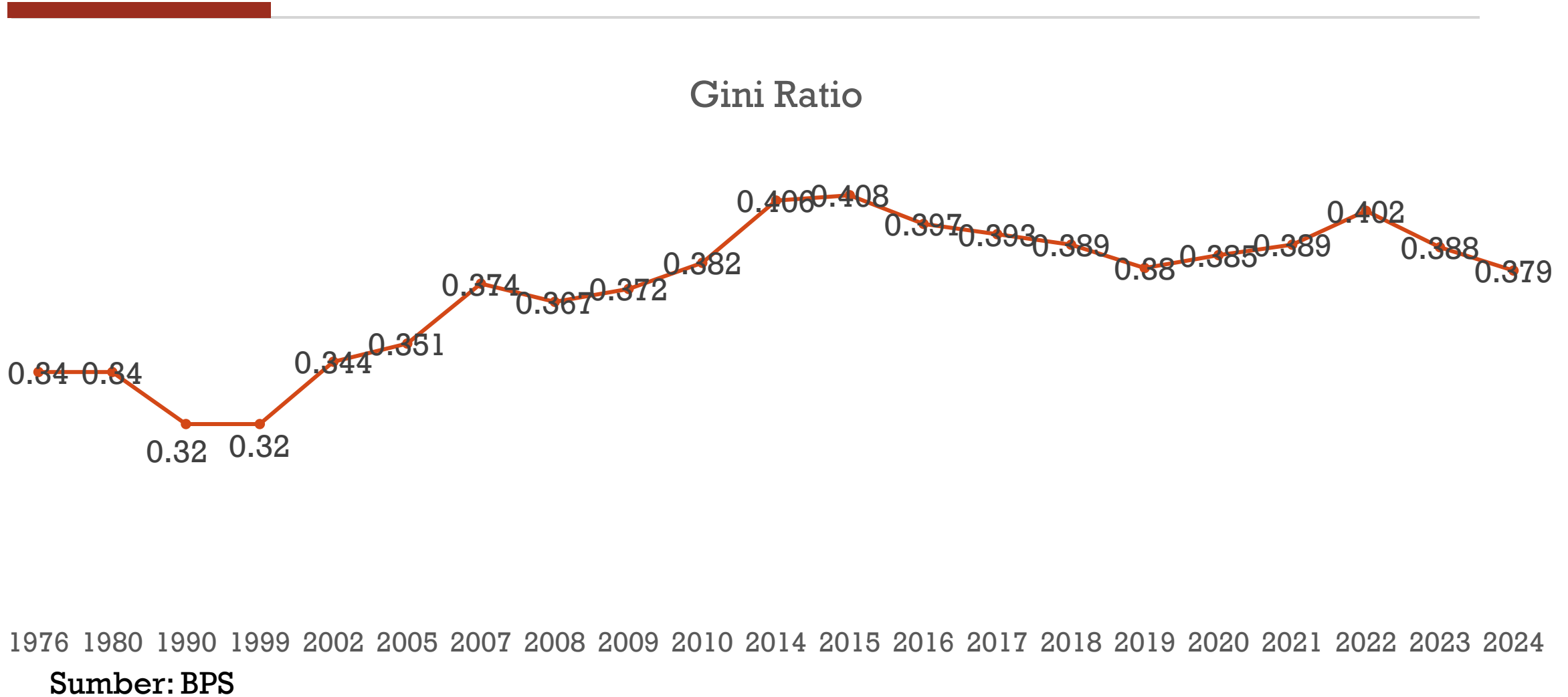
INDUSTRI PENGOLAHAN (MANUFAKTUR): TUMBUH LEBIH LAMBAT DARI PERTUMBUHAN EKONOMI, PERANNYA MENURUN SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI, PORSINYA ATAS PDB MENURUN



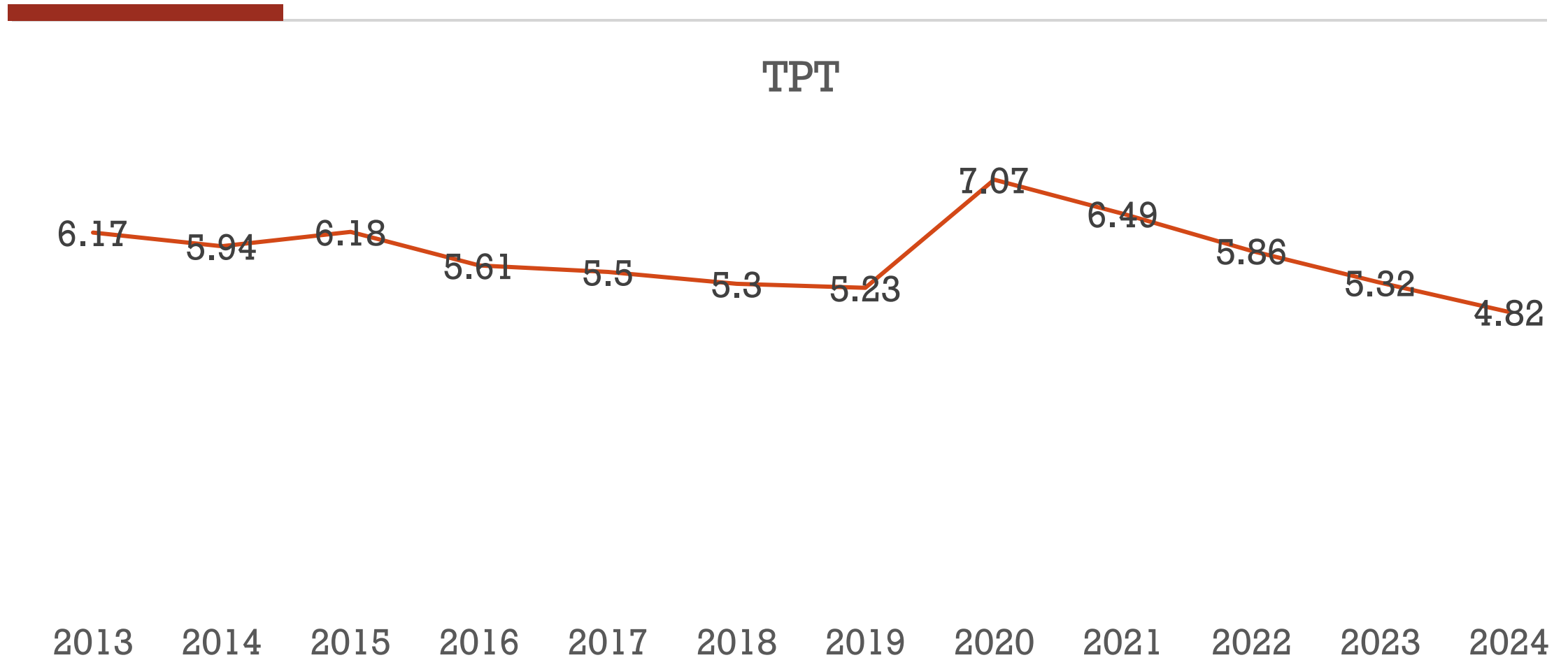
Sumber data: BPS (diolah)



GINI RATIO



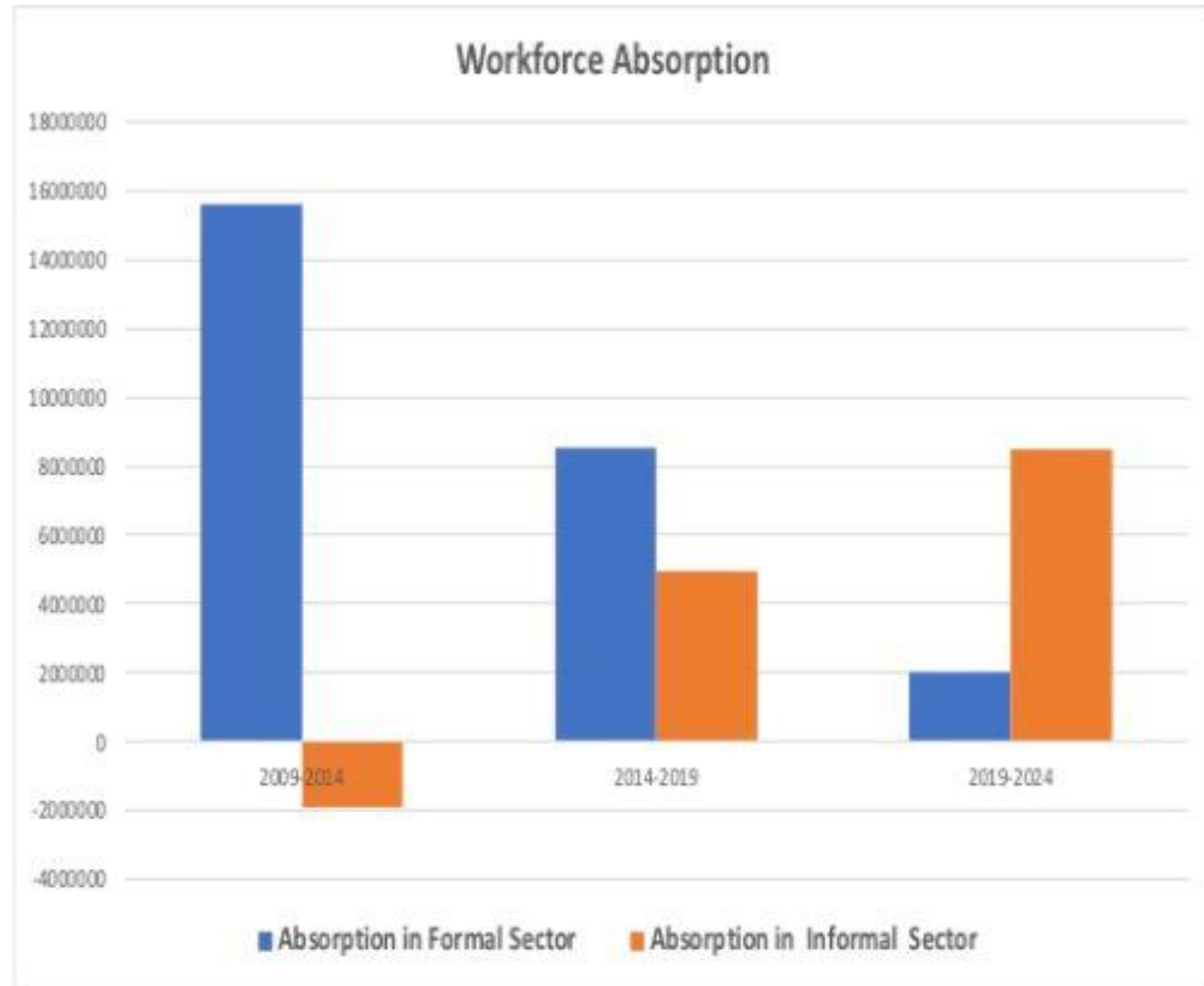
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Sumber: BPS

TERJADI INFORMALISASI PEREKONOMIAN

Menarik !!! Untuk memperhatikan data Sakernas BPS ini. Dalam periode 2019-2024 tenaga kerja sebagian besar diserap oleh sektor informal. Bandingkan dengan periode sebelumnya dimana lapangan kerja yang tercipta adalah sektor formal. Hal ini menjelaskan mengapa porsi kelas menengah turun dan aspiring middle class naik, krn lapangan kerja yg tercipta lebih banyak sektor informal yg umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibanding sektor formal (<https://x.com/ChatibBasri/status/>).





Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja di Sektor Informal Indonesia (Februari 2019-Februari 2024)



Pekerja Sektor Informal Bertambah, Kini Capai 84 Juta Orang

[Visit >](#)



ADA TIGA MODEL ORIENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA- NEGARA BERKEMBANG

Pertama, Model Orientasi Pembangunan Ekonomi dimana Pertumbuhan PDB hanya sebagai faktor ~~Indikatif~~, yakni Pertumbuhan Ekonomi tersebut dicapai melalui Pemerataan (*growth through Equity*). Misalnya Malaysia melalui NEP dengan Kebijakan Pemihakan kpd kaum Bumi Putera Zaman Mahatir (1981 – 2003) atau Jepang dan Taiwan awal2 Pembangunannya melalui UMKM atau Korea Selatan melalui Land Reform..

Kedua, Model Pertumbuhan Ekonomi Bersama Pemerataan (*Growth with Equity*) Zaman Soeharto (1974 – 1978) di Indonesia dengan Pertumbuhan rata2 7,5% bersamaan dengan 8 Jalur Pemerataan, Atau Thailand melalui pembangunan Agro-Industri rakyat scr besar2an

Ketiga, Model Orientasi Pertumbuhan Ekonomi *at all cost* (*GDP Oriented*). Seperti Indonesia di Era Reformasi lewat Privatisasi besar2an (2000 – 2014) dan **Melalui Utang LN dan pembangunan Infrastruktur fisik besar2an (Tol, Pelabuhan Udara dan Laut, LRT, MRT, IKN etc) (2014-2023)**. Juga di China lewat Zona Ekonomi khusus. Bedanya **di Indonesia peran Negara Minimum**. Smntr di China ada Peran Negara Totaliter Komunis yang sngt kuat menjaga Pemerataan dan Pemberantasan Korupsi yang konsisten..



PEMBANGUNAN YG HANYA MENGEJAR PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI (1)

- Terjadi “trickle-up” : **bukan** “trickle down effect” seperti jargon pembangunan (berbasis liberalisme), yakni menetesnya hasil-hasil pembangunan ke daerah dan pedesaan serta rakyat
- Proses “Trickle- up” Sumber-sumber daya dan hasil-hasil Pembangunan itu mengalir dari daerah-daerah dan pedesaan ke kota-kota besar dan ibu kota serta ke para pelaku pembangunan (pelaku bisnis dan elit-elite pendukungnya di Ibu kota & kota-kota besar) di NSB/Indonesia.



PEMBANGUNAN YG HANYA MENGEJAR PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI (2)

- Penyusunan RAPBN & RAPBD (meski dlm era Otda), akan tetap memilih alokasi Fiskal, moneter dan perbankan yg “Sensitif thd Pertumbuhan PDB/PDRB” (makin padat modal & teknologi dan makin rendah Penyerapan Tng Kerja) ==> makin menyulitkan dlm Mensejahterakan Rakyat di Daerah2 & makin Menajamkan Ketimpangan (antar gol.pendapatan, antar Sektor & antar Wilayah)
- Dg Sistem Politik dan Pemilu yg “High Cost”, maka Proses “mningggalkan Orientasi kpd Kesejahteraan Rakyat” makin nyata, apalagi Elit2 (Pusat + daerah2) yg Eksekutif di Pusat & Kepala Daerahnya trpilih dg Politik Uang dan Transaksional. Dus, Pembangunan Nasioinal dan Daerah2 makin tidak demokratis dan makin tidak berkelanjutan (Ekonomi, Sosial & ekologi)...



PEMBANGUNAN YG HANYA MENGEJAR PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI (3)

- **Di Era Reformasi, UU : BI, Perbankan, Lalu Lintas Devisa, Pasar Modal, dst (yg mrpkn bagian yg memprkuat GDP Oriented) bersifat “Againt to Otda, Decentrized Economy and Political democratic”, krn bersifat “Financial Centralism” , shg yg dikorbankan adlh UMKM & Daerah2 yg makin jauh dari Jakarta...**
- **Infrastruktur (Fisik, Sosial, Ekonomi, Politik, Soft) mendukung / Follow to GDP Orineted yang mngorbankan UMKM dan Daerah2 serta Golongan Pendapatan Rendah baik scr Nasional maupun di internal Daerah tersebut....**



DAMPAK GDP ORIENTED, TIGA MACAM KESENJANGAN SOSIAL (1) :

- KESENJANGAN ANTAR GOL.PENDAPATAN: A.L MNRT CREDIT SUISE, 2021, BHW 4 ORANG TERKAYA SAMA DENGAN 100 JT PENDUDUK, 1% TERKAYA SAMA DG 46,6% DAN 10% TERKAYA SAMA DG 75,3% JUMLAH KEKAYAAN SLRH PENDUDUK..

- KESENJANGAN ANTAR WILAYAH, A.L SUMBANGAN JAWA THD KEKAYAAN NASIONAL (PDB) 58,48% YG WILAYAHNYA HANYA SEK.3% WIL.NASIONAL...

KESENJANGAN ANTAR SEKTOR: UKM VS BESAR. KONTRIBUSI UMKM THD PRODUKSI NASIONAL (PDB) 2021 : 63,34% YG PERSENTASENYA 99,98% DARI TOTAL UNIT USAHA. SMNTR DARI SISI KESEMPATAN KERJA MENYERAP 96%.



DAMPAK GDP ORIENTED (2)

1. KETIDAKADILAN / KETIMPANGAN : ANTAR GOLONGAN PENDAPATAN, ANTAR DAERAH, ANTAR SEKTOR DAN PENGUASAAN ASSET (POWER INDEX) MENINGKAT DARI 678.000 X THN 2014 MENJADI 1.065.000 X THN 2023) KEMUNGKINAN TERBURUK DI DUNIA (DIHITUNG DARI SUMBER DATA FORBES DAN BPS).
2. KEBOCORAN DAN KORUPSI (ERA ORBA RATA2 30% MENINGKAT DI ERA REFORMASI, ANTARA 30 S/D 57%, SUBER DARI PULUHAN RISET MHSW BIMBINGAN DSD)
3. OTONOMI DAERAH YANG BELUM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT (BARU SEKITAR 10% DARI PARA KPL DAERAH YANG DINILAI BERHASIL)
4. PROBLEM EKOSISTEM POLITIK YANG MENYUBURKAN OLIGARKI BISNIS SHG BERDAMPAK INDONESIA TERANCAM "MIDDLE INCOME TRAP"
5. 'STRUKTUR TEMPAYAN DALAM PEREKONOMIAN' YG MSH SNGT JAUH DARI "STRUKTUR BELAH KETUPAT" (HAPIR TIDAK ADA PERUBAHAN SELAMA INI).



MUTLAK PERLUNYA REFORMA EKONOMI-POLITIK DECARA MENDASAR (I)

- MENGGESER ORIENTASI PEMBANGUNAN YANG TERLALU “GDP ORIENTED” KEARAH “SUSTAINABLE GOWTH” (EKONOMI, SOCIAL & EKOLOGI) WITH EQUITY”
- GDP SEBAGAI FACTOR INDIKATIF YANG HARUS DIKUTI OLEH TUJUAN MENCAPAI KEBERLANJUTAN SCR EKONOMI, SOCIAL DAN EKOLOGI SERTA TARGET PEMERATAAN DENGAN INDIKARTOR YANG KONGKRIT DAN TERUKUR DARI WAKTU KR WAKTU SRT INLINE DG KEBIJAKAN FISCAL, MONETER, PERBANKAN DAN TATA RUANG SCR NASIONAL DAN DAERAH2.
- REFORMA PENGELOLAAN FISCAL DAN MONETER YANG TERLALU TERKONSENTRASI DI KEMENTRIAN KEUANGAN PERLU DIREFORM DENGAN DIPISAH DIMANA BAPPENAS SEBAGAI PERENCANA PEEREONOMIAN NASIONAL SEKALIGUS SEBAGAI PENGELOLA OTORITAS FISCAL BERSAMA KEMENKEU (JG SBG BENDAHARA NEGARA), BANK INDONESIA SBG PEMEGANG OTORITAS MONETER DAN ADA BADAN PENERIMAAN PENDAPATAN NEGARA.



MUTLAK PERLUNYA REFORMA EKONOMI-POLITIK SDECARA MENDASAR (II)

- PERLUNYA DIKEMBALIKAN KPK SBG KOMISI NEGARA YNG INDEPENDENT DAN MENAIKAN STATUS KPPU SBG KOMISI NEGARA YG INDEPENDEN SELEVEL KPK. KPK YANG KUAT, INDEPENDENT DAN GOVERNANCE DITARGETKAN UNTUK MENURUNKAN KORUPSI SCR SIGNIFIKAN. SMNTR KPPU DITARGETKAN MENYEHATKAN PASAR DAN PARA PELAKU EKONOMINYA SRT MENCEGAH KARTELISASI DAN OLIGARKI EKONOMI DAN JD PENOPANG PEMERINTAH DALAM MENDORONG PELAKU EKONOMI JADI PEMAIN INDUSTRIAL YANG EFISIEN DAN INOVATIF.
- ADANYA INDICATOR-2 SUKSES OTONOMI DAERAH-2 DG INCINTIVE DAN DISINCENTIVE DALAM ALOKASI FISCAL DAERAH (DAU DAN DAK) SRT DESENTRALISASI FISCAL DAN DILAKUKAN PERANGKINGAN DAERAH-2 YANG SUKSES
- PERLUNYA REVISI UU POLITIK YANG MELARANG SUMBANGAN KPD PARPOL DAN ELITNYA SERAYA MEMBIAYAI SEPENUHNYA OLEH APBN PARPOL YANG MEMENUHI PARLEMENTARY THRESHOLD. KEMUDIAN MEMFOKUSKAN KORPORASI SEBAGAI PEMAIN INDUSTRIAL YANG EFISIEN DAN INNOVATIVE DENGAN MEMPERKUAT BERLAKUNYA UU HLIRISASI YANG MENGUNTUNGAN PEREKONOMIAN NASIONAL..



MUTLAK PERLUNYA REFORMA EKONOMI- POLITIK SECARA MENDASAR (III)

- PERLUNYA KOREKSI STRUKTUR EKONOMI TEMPAYAN MENJADI STRUKTUR BELAH KETUPAT DIMANA TERDAPAT KELAS MENENGAH YANG BESAR DAN KECILNYA PELAKU INFORMAL, MIKRO DAN KECIL :

(1) DENGAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN YANG MASSIF ALA GRAMENT BANK MOHAMMAD YUNUS .

(2) UNTUK MEMPERBESAR KELAS MENENGAH DENGAN ALOKASI PERBANKAN DARI 20% MENURUT UU MENJADI 40-50%. SEMENTARA KORPORASI BESAR JADI PELAKU KELAS GLOBAL YANG KOMPETITIF DENGAN BERBAGAI INCENTIVE DAN BANTUAN MARKET INTELLIGENCE DARI PEMERINTAH.



TERIMA KASIH

